

REKAP 1: K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2021

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DALAM NEGERI
2. VISI : Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkeprbadian berlandaskan Gotong Royong
3. MISI : 1 Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri
2 Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pematapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi
3 Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyalarsan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas

4. PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL	ALOKASI 2021 (RIBU)
01	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	2.200.000,0
02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	252.801.730,0
03	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	12.398.400,0
04	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	3.450.000,0
05	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	13.400.000,0
07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	140.326.420,0
Total		424.576.550,0

5. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L

KODE	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L	TARGET 2021	ALOKASI 2021 (RIBU)
01	Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia		136.876.418,0
01.01	Indeks Demokrasi Indonesia	77,72	
01.02	Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada dan Pemilu		
01.03	Indeks Kinerja Ormas	Nilai 60	
02	Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah		6.280.000,0
02.01	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi	Nilai 2.385	
02.02	Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM)	67,2	
02.03	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi	Nilai 2.870	
02.04	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya	Nilai 2.315	
03	Meningkatnya kewaspadaan nasional		4.525.000,0
03.01	Indeks Kewaspadaan Nasional	-	
04	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas		27.250.400,0
04.01	Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori "Baik"	-	
04.02	Indeks kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan trantibumlinmas	-	
05	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri		655.675.549,0
05.01	Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun	50%	
05.02	Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri	Level 3 (80%)	
05.03	Tingkat Kapasitas PPUPD Secara Nasional	Level 3 (80%)	
05.04	Indeks kepuasan stakeholder terhadap kinerja alumni	Nilai 3 20	
06	Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah		5.561.200,0
06.01	Indeks kepatuhan penyusunan produk hukum daerah	Nilai 75 (Tinggi)	
07	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif		346.426.710,0
07.01	Indeks kinerja kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai 75 (Tinggi)	
07.02	Nilai evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai 2.9 (Tinggi)	
07.03	Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM	50%	
07.04	Indeks sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Nilai 50 (Sinkron)	
07.05	Persentase desa dengan nilai Indeks penyelenggaraan pemerintahan desa kategori nilai "Baik"	20%	
07.06	Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai 36,25	
07.07	Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	18%	
07.08	Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori "utama"	82 Daerah	
07.09	Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah	Nilai 85	
07.10	Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah	Nilai 75 (B)	

KODE	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L	TARGET 2021	ALOKASI 2021 (RIBU)
08	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan		681 650 683.0
08.01	Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	92% Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan	
08.02	Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani Kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (kumulatif)	2 223 Lembaga Pengguna	
09	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan		145.048 090.0
09.01	Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan		
10	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri		1 168 697 793.0
10.01	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri	Nilai 87.01	
11	Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas		20 258 595.0
11.01	Indeks pengawasan Internal	Nilai 85	
11.02	Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus	Nilai 81	
12	Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri		6 450 000.0
12.01	Persentase hasil kelibangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri	45%	
Total			3 204 700 438.0

6. PROGRAM DAN PENDANAAN

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2021											PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)		
		RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL	2022	2023	2024
			RMP	PLN	RMP	HLN	HDN								
010.CM	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	376.627.758,0	0,0	108.531.606,0	0,0	12.000.000,0	0,0	24.831.989,0	0,0	0,0	0,0	521.991.353,0	824.730.000,0	840.230.000,0	859.230.000,0
010.CP	Program Tata Kelola Kependudukan	681.650.683,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	681.650.683,0	2.663.272.000,0	3.567.887.000,0	5.706.906.000,0
010.CR	Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum	147.681.418,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	147.681.418,0	1.376.854.000,0	1.384.258.000,0	1.835.070.000,0
010.WA	Program Dukungan Manajemen	1.845.608.170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.768.814,0	0,0	0,0	0,0	1.853.376.984,0	2.558.900.000,0	3.008.926.000,0	4.090.372.000,0
Total		3.051.568.029,0	0,0	108.531.606,0	0,0	12.000.000,0	0,0	32.600.803,0	0,0	0,0	0,0	3.204.700.438,0	7.423.757.000,0	8.801.302.000,0	12.491.579.000,0

Jakarta, 13 Oktober 2020
Menteri Dalam Negeri



Muhammad Tito Karnavian